

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI I DPR RI  
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA,  
BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA  
SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI,  
PERUM ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN  
KOMISI INFORMASI PUSAT)**

---

Tahun Sidang : 2009-2010  
Masa Persidangan : III  
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Senin, 14 Juni 2010  
Waktu : Pukul 10.00 WIB  
Pimpinan Rapat : Kemal Azis Stamboel  
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1,  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Acara : 1. Pembukaan  
2. Penjelasan Menhan dan Panglima TNI  
3. Tanya Jawab  
4. Penutup  
Hadir : 45 orang dari 45 orang Anggota Komisi I DPR RI  
Pemerintah : - Menteri Pertahanan, Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.A., M.Sc.  
- Panglima TNI, Jenderal TNI Djoko Santoso  
beserta jajarannya

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi I DPR RI pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2010 dengan acara sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Kemal Azis Stamboel, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Sehubungan dengan upaya mendukung pemberdayaan industri strategis pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan Alutsista TNI, Komisi I DPR RI minta Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan agar sedapat mungkin dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista, baik dalam rangka pengadaan maupun pemeliharaan, dilakukan dengan memberdayakan BUMNIS yang ada dengan mengoptimalkan produk lokal industri strategis. Terkait dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI minta Pemerintah untuk menyederhanakan mata rantai mekanisme anggaran pengadaan Alutsista dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari *end user* dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mempersiapkan langkah-langkah pemberdayaan BUMNIS dengan melibatkan sektor perbankan nasional.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen dan pembinaan BUMNIS di bidang pertahanan, Komisi I DPR RI minta Pemerintah untuk segera memikirkan kemungkinan pembinaan BUMNIS di bidang pertahanan berada di bawah Kementerian Pertahanan. Hal ini dimaksudkan agar upaya pembinaan BUMNIS yang memproduksi produk-produk pertahanan, yang tadinya berada dibawah Kementerian BUMN, dapat lebih berkonsentrasi terhadap peningkatan produk-produk pertahanan.
3. Dalam upaya meningkatkan kualitas produk-produk pertahanan produksi BUMNIS, Komisi I DPR RI minta Pemerintah untuk melakukan kajian mendalam tentang berbagai kemungkinan kerja sama kemitraan dengan berbagai negara mitra yang mempunyai potensi untuk dilakukan kerja sama pengembangan alutsista yang mendukung dilaksanakannya *transfer of technology* bagi pengembangan kemampuan industri strategis/pertahanan nasional dengan meningkatkan *local content*.
4. Terkait dengan penyelesaian berbagai permasalahan aset tanah yang ada di lingkungan Kemhan dan TNI, Komisi I DPR RI sepakat untuk meningkatkan alokasi anggaran sertifikasi tanah aset negara yang digunakan oleh TNI dalam Tahun Anggaran 2011 dan seterusnya dengan tidak mengganggu anggaran Kemhan dan Mabes TNI (bersifat "*on top*").
5. Dalam upaya memerangi tindak terorisme, Komisi I DPR RI minta Pemerintah untuk segera mempersiapkan payung hukum bagi sinergi dan melibatkan berbagai satuan anti teror yang terdapat di jajaran TNI dan POLRI, agar tercipta efisiensi dan koordinasi yang baik dalam menghadapi aksi terorisme.

6. Dalam rangka meletakkan dasar-dasar bagi penyelenggaraan Keamanan dan penyelenggaraan Pertahanan Nasional, Komisi I DPR RI mendorong pemerintah untuk segera mempersiapkan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional.
7. Komisi I DPR RI mendukung prinsip kerja sama di bidang pertahanan antara RI dengan negara lain, termasuk dengan Amerika Serikat, sepanjang kerja sama tersebut searah dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan diiringi dengan adanya prinsip kesetaraan dan kepentingan bersama kedua negara, serta saling menghormati.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

Jakarta, 14 Juni 2010  
**KETUA RAPAT,**

**KEMAL AZIS STAMBOEL**  
**A-76**